

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Panjatan Tahun 2017-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Panjatan Tahun 2011-2016, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat kecamatan maupun daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik lokal maupun daerah, dan tugas dan fungsi kecamatan selaku OPD.

Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, Kecamatan Panjatan harus melaksanakannya secara sungguh-sungguh dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan isu-isu strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kecamatan Panjatan yaitu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022.

Panjatan, 14 Desember 2017

CAMAT PANJATAN,

SUDARMANTO, S.IP, M.Si.  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19730512 199803 1 008

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 telah mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun rencana strategis secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap OPD harus membuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Renstra Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017–2022 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Kulon Progo yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Draft Renstra Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017–2022 berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005–2025 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Panjatan sangat penting bagi Kecamatan Panjatan dan Masyarakat, maka penyusunan Renstra Kecamatan Panjatan dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Kecamatan Panjatan Tahun 2017–2022 berisi tujuan, Kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Panjatan disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

#### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Panjatan**

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Panjatan ini, peraturan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu:

- a. Landasan Idiil Pancasila
- b. Landasan Konstitusional Undang-undang Dasar 1945

- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- d. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022
- l. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja Pada Kecamatan
- m. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (renstra) Kecamatan Panjatan disusun dengan maksud sebagai :

- a) Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/ program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan

- b) Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c) Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Panjatan adalah:

- a) Memenuhi ketentuan peraturan perencanaan OPD.
- b) Memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Panjatan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah
- c) Menjabarkan tentang gambaran umum keadaan Kecamatan Panjatan sekarang dan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Bupati.
- d) Mewujudkan keterpaduan dan kesinambungan antara program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang direncanakan.
- e) Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

#### 1.4. Sistematika penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panjatan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VII	PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja Pada Kecamatan maka kecamatan mempunyai fungsi dan tugas pokok sebagai berikut :

##### 1. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja Pada Kecamatan adalah sebagai berikut:

##### 1) Sekretariat Kecamatan

- a. Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
- b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan, penyusunan program kerja dan laporan serta administrasi serta administrasi kepegawaian.
- c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan laporan serta koordinasi administrasi keuangan

##### 2). Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa, administrasi kependudukan, pertanahan, dan melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan lainnya.

##### 3). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

##### 4). Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan pembangunan, sarana dan prasarana fisik, pertanian dan kelautan, perekonomian, dan lingkungan hidup.

##### 5). Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan rakyat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi kesejahteraan, ketenagakerjaan, transmigrasi, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kebudayaan kepariwisataan, kepemudaan dan olah raga.

6). Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja Pada Kecamatan, Camat mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Camat juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :

- a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

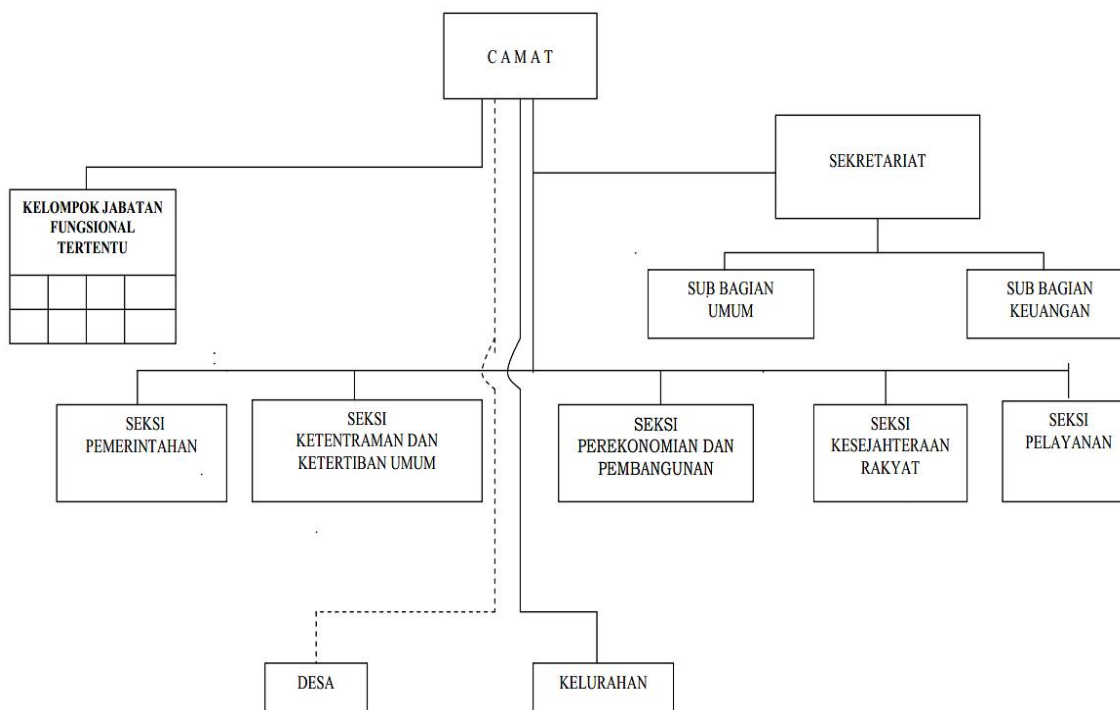
Susunan organisasi dan tata kerja kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah diatur menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja Pada Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat
  - 1) Sub Bagian Umum
  - 2) Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- g. Seksi Pelayanan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Struktur organisasi Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Secara umum kondisi kepegawaian dan perlengkapan Kecamatan Panjatan sudah dikelola secara lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian kondisinya masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Adapun kondisi selengkapny dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Formasi Pegawai

Dalam urusan kepegawaian, Jumlah kecukupan pegawai untuk Kecamatan Panjatan masih mengalami kekurangan sebanyak 10 orang. Dimana formasi ideal sesuai dengan Analisis Kebutuhan Pegawai adalah 30 orang sementara besetting/Kondisi sebenarnya hanya terdapat 20 orang. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan Formasi dan Bezetting Kecamatan Panjatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 2.1.**  
**Keadaan Formasi dan Bezetting Kecamatan Panjatan**

No	Unit	Formasi	Bezetting	Ket.
1.	Camat	1	1	0
2.	Sekretariat	10	9	-1
4.	Seksi Pemerintahan	2	2	0
5.	Seksi Ekonomi Pembangunan	4	2	-2
6.	Seksi Kesejahteraan Rakyat	4	2	-2
7.	Seksi Pelayanan	4	2	-2
8.	Seksi Tramtib	5	2	-3
Jumlah		30	20	-10

Sumber: Sub Bagian Umum Kecamatan Panjatan, 2017

## 2. Tingkat Pendidikan Pegawai

Dalam hal tingkat pendidikan, Pegawai di Kecamatan Panjatan rata-rata adalah SLTA. Adapun data selengkapnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Tingkat Pendidikan Aparatur di Kecamatan Panjatan**

No.	Tingkat Pendidikan	Banyaknya (orang)
1.	SLTP	-
2.	SLTA	10
3.	D3	-
4.	D4	-
5.	S1	8
6.	S2	2
Jumlah		20

Sumber: Sub Bagian Umum Kecamatan Panjatan, 2017

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan kompetensi pegawai yang ada dengan jalur usul pelatihan atau peningkatan kompetensi kepada BKPP Kabupaten Kulon Progo atau melalui jalur peningkatan secara mandiri melalui Bimtek Internal.

## 3. Penyebaran Pangkat dan Golongan PNS

Dari segi penyebaran pangkat dan golongan di Kecamatan Panjatan, yaitu ada empat golongan I, II, III dan IV. Adapun Rincian penyebaran pangkat dan golongan PNS sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Penyebaran Pangkat dan Golongan PNS**  
**di Kecamatan Panjatan**

No.	Pangkat dan Golongan	Banyaknya (orang)
1.	Pembina Tk I ; IV/a	2
2.	Penata Tingkat I; III/d	5
3.	Penata; III/c	-
4.	Penata Muda Tingkat I; III/b	8
5.	Penata Muda; III/a	0
6.	Pengatur Tingkat I; II/d	0
7.	Pengatur ; II/c	4
8.	Pengatur Muda Tingkat I; II/b	0
9.	Pengatur Muda; II/a	1
Jumlah		20

Sumber: Sub Bagian Umum Kecamatan Panjatan, 2017

#### 4. Penyebaran Jabatan Struktural dan Tingkat Pendidikan

Dari segi pendidikan yang disandang pejabat struktural yang ada di Kecamatan Panjatan dapat dilihat bahwa semua jabatan telah berlatar belakang pendidikan sarjana sesuai dengan analisis jabatan yang telah dibuat oleh bupati. Adapun data selengkapnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Penyebaran Jabatan Struktural Dan Pendidikan**  
**Kecamatan Panjatan**

No.	Pangkat / Golongan	Tingkat Pendidikan
1.	Camat	Pasca Sarjana (S2)
2.	Sekretaris Kecamatan	Sarjana (S1)
3.	Kasubbag Umum	Sarjana (S1)
4.	Kasubbag Keuangan	Sarjana (S1)
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Sarjana (S1)
6.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Sarjana (S1)
7.	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Sarjana (S1)
8.	Kepala Seksi Pelayanan	Pasca Sarjana (S2)
9.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Sarjana (S1)

Sumber: Sub Bagian Umum Kecamatan Panjatan, 2017

## 5. Sarana dan Prasarana

Kantor Kecamatan Panjatan berdiri di atas tanah Kasultanan (*Sultan Ground*). Dari segi luas bangunan kantor sudah mencukupi namun masih perlu penataan dan rehabilitasi kecil meskipun sebagian besar bangunan sudah dilaksanakan rehab/pemeliharaan pada awal tahun 2017 untuk bangunan gedung pelayanan dan gedung kantor sayap barat. Sedangkan untuk pertengahan tahun 2017 dilaksanakan rehab Gedung Kantor Utama oleh Dinas Kebudayaan karena statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya (BCB). Untuk keadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pelayanan masyarakat yang terdapat di Kecamatan Panjatan. adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5.**  
**Data Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Panjatan**

Gol	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
01	Tanah	0	0
02	Mesin dan Peralatan	211	658.517.446
03	Gedung dan Bangunan	6	617.147.171
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
05	Aset tetap Lainnya	1	4.300.000
06	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
<b>JUMLAH</b>		218	1.279.964.617

Sumber: Sub Bagian Umum Kecamatan Panjatan, 2017

Dari sejumlah asset tersebut ada beberapa sarana dan prasarana yang memiliki kondisi kurang baik/rusak ringan sehingga kurang bisa didaya gunakan secara. Sarana dan Prasarana dalam kondisi rusak ringan (KB) tersebut senilai total Rp. 294.368.000.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

SPM (Standar Pelayanan Minimal) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Untuk mengetahui suatu instansi pemerintah sudah memenuhi SPM maka diperlukan suatu Indikator, Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM mempertimbangkan, kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar, target pelayanan dasar yang akan dicapai, dan kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah dan komitmen nasional. Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah, dan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kebutuhan daerah.

Faktor analisis kemampuan dan potensi daerah meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat. Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk menganalisis penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah, perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah, perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanjakegiatan berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan, dan perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah. Rencana pencapaian dan penerapan SPM dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM, Target tahunan pencapaian dan penerapan SPM dituangkan dalam Renja SKPD, RKPD, KUA, PPA, RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

Rencana tahunan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan Renstra SKPD, yang selanjutnya dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan untuk dianggarkan dalam satu tahun anggaran dalam RKPD. Rencana pencapaian dan penerapan SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah, Tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan SPM dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Capaian kinerja pada periode renstra sebelumnya (2011-2016) dapat dilihat dari rata-rata dari indikator input, output, dan outcome. Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja kegiatan selama 5 tahun secara umum telah dapat dicapai dengan baik (sangat berhasil). Rincian capaian

kinerja kegiatan dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang pada dasarnya dinilai berhasil berdasarkan indicator penyerapan dana dari APBD Kabupaten, Propinsi maupun pusat. Khusus untuk APBD Kabupaten Kulon Progo Kecamatan Panjatan berhasil melaksanakan dengan rata-rata penyerapan sebesar 98,35 %, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Panjatan  
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya (MDGs dsb)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<b>Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	-	-	-	<b>86,47</b>	<b>86,47</b>	<b>87,01</b>	<b>87,55</b>	<b>88,31</b>	<b>86,47</b>	<b>86,47</b>	<b>87,55</b>	<b>87,55</b>	<b>8,53</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,6</b>	<b>100</b>	<b>100,2</b>
	Jumlah sebagian urusan yang dapat dilaksanakan Kecamatan	-	-	-	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	100	100	100	100	100
	Jumlah sebagian urusan yang dilimpahkan kecamatan	-	-	-	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	100	100	100	100	100
	Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan	-	-	-	183	183	188	193	200	183	183	193	193	202	100	100	102,7	100	101
	Jumlah fasilitasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan	-	-	-	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	100	100	100	100	100
	Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
	Jumlah dokumen (Monografi, Profil, Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan)	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100

Tabel 2.7  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Panjatan  
 Tahun 2012-2016

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>58.118.500</b>	<b>57.643.500</b>	<b>64.365.500</b>	<b>62.511.400</b>	<b>75.760.000</b>	<b>52.776.225</b>	<b>54.419.837</b>	<b>59.157.048</b>	<b>61.635.750</b>	<b>75.672.250</b>	90,81	94,41	91,91	98,60	99,88	7,29	9,70
Penyediaan jasa surat menyurat	525.000	525.000	525.000	-	-	525.000	525.000	525.000	-	-	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.600.000	10.080.000	10.080.000	-	-	8.286.225	7.231.337	7.790.648	-	-	65,76	71,74	77,29	0,00	0,00	-10,00	-2,50
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	1.975.000	1.200.000	900.000	-	-	956.500	916.900	383.400	-	-	48,43	76,41	42,60	0,00	0,00	-32,12	-31,16
Penyediaan jasa administrasi keuangan	12.900.000	12.900.000	12.900.000	-	-	12.900.000	12.900.000	12.750.000	-	-	100,00	100,00	98,84	0,00	0,00	0,00	-0,58
Penyediaan jasa kebersihan kantor	917.000	917.000	957.000	-	-	917.000	917.000	916.000	-	-	100,00	100,00	95,72	0,00	0,00	2,18	-0,05
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1.700.000	1.700.000	3.010.000	-	-	1.700.000	1.700.000	3.010.000	-	-	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	38,53	38,53
Penyediaan alat tulis kantor	5.386.500	6.581.500	6.288.500	-	-	5.386.500	6.490.100	5.192.500	-	-	100,00	98,61	82,57	0,00	0,00	8,87	0,25
Penyediaan barang cetakan, penggandaan	5.114.000	5.114.000	5.717.000	-	-	5.114.000	5.113.500	4.601.500	-	-	100,00	99,99	80,49	0,00	0,00	5,90	-5,01
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	776.000	776.000	850.000	-	-	776.000	776.000	850.000	-	-	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	4,77	4,77
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	840.000	840.000	840.000	-	-	840.000	840.000	840.000	-	-	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan makanan dan minuman	10.055.000	12.690.000	15.228.000	-	-	10.055.000	12.690.000	15.228.000	-	-	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	23,10	23,10

## RENSTRA KECAMATAN PANJATAN | 2017

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	5.330.000	4.320.000	5.630.000	-	-	5.320.000	4.320.000	5.630.000	-	-	99,81	100,00	100,00	0,00	0,00	5,69	5,76
Penyediaan jasa pelayanan kantor	-	-	1.440.000	-	-	-	-	1.440.000	-	-	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	-	-	-	25.211.400	36.513.000	-	-	-	25.115.750	36.432.500	0,00	0,00	0,00	99,62	99,78	44,83	45,06
Penyediaan jasa keuangan	-	-	-	14.100.000	14.247.000	-	-	-	13.450.000	14.245.750	0,00	0,00	0,00	95,39	99,99	1,04	5,92
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	-	-	-	23.200.000	25.000.000	-	-	-	23.070.000	24.994.000	0,00	0,00	0,00	99,44	99,98	7,76	8,34
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>59.699.000</b>	<b>246.658.100</b>	<b>87.832.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.068.000</b>	<b>240.675.000</b>	<b>87.267.695</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,94</b>	<b>97,57</b>	<b>99,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,39</b>	<b>121,86</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional	-	181.075.100	-	-	-	-	175.179.000	-	-	-	0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	13.200.000	16.000.000	-	-	-	13.019.000	15.913.000	-	-	-	98,63	99,46	0,00	0,00	0,00	21,21	22,23
Pembangunan rumah dinas	-	-	8.460.000	-	-	-	-	8.460.000	-	-	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Meubeler	-	3.000.000	9.850.000	-	-	-	3.000.000	9.850.000	-	-	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	228,33	228,33
Pemeliharaan rutin/ berkala gendung kantor	-	-	28.400.000	-	-	-	-	27.901.650	-	-	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	46.499.000	45.583.000	41.122.000	-	-	46.049.000	45.583.000	41.056.045	-	-	99,03	100,00	99,84	0,00	0,00	-5,88	-5,47
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139.830.600</b>	<b>173.115.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>137.450.973</b>	<b>159.698.807</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,30</b>	<b>92,25</b>	<b>23,80</b>	<b>16,19</b>
Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	-	-	-	55.004.000	81.165.000	-	-	-	54.974.100	73.194.450	0,00	0,00	0,00	99,95	90,18	47,56	33,14
Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	-	-	-	84.826.600	91.950.000	-	-	-	82.476.873	86.504.357	0,00	0,00	0,00	97,23	94,08	8,40	4,88



## RENSTRA KECAMATAN PANJATAN | 2017

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>1.964.000</b>	<b>2.296.000</b>	<b>2.700.000</b>	-	-	<b>1.964.000</b>	<b>2.295.700</b>	<b>2.608.800</b>	-	-	100,00	99,99	96,62	0,00	0,00	17,25	15,26
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000	1.100.000	1.200.000	-	-	1.000.000	1.100.000	1.174.000	-	-	100,00	100,00	97,83	0,00	0,00	9,55	8,36
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	964.000	1.196.000	1.500.000	-	-	964.000	1.195.700	1.434.800	-	-	100,00	99,97	95,65	0,00	0,00	24,74	22,02
<b>Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja</b>	-	-	-	<b>10.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	-	-	-	<b>9.936.900</b>	<b>14.915.050</b>	0,00	0,00	0,00	99,37	93,22	60,00	50,10
Penyusunan perencanaan kinerja	-	-	-	1.500.000	5.000.000	-	-	-	1.468.100	4.637.750	0,00	0,00	0,00	97,87	92,76	233,33	215,90
Penyusunan laporan keuangan	-	-	-	3.500.000	5.000.000	-	-	-	3.492.000	4.457.400	0,00	0,00	0,00	99,77	89,15	42,86	27,65
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	-	-	-	5.000.000	6.000.000	-	-	-	4.976.800	5.819.900	0,00	0,00	0,00	99,54	97,00	20,00	16,94
<b>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>2.700.000</b>	-	-	<b>2.500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>2.580.900</b>	-	-	100,00	100,00	95,59	0,00	0,00	44,73	39,31
Penyusunan Renstra SKPD	1.500.000	-	1.500.000	-	-	1.500.000	-	1.450.500	-	-	100,00	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	-3,30
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1.000.000	1.100.000	1.200.000	-	-	1.000.000	1.100.000	1.130.400	-	-	100,00	100,00	94,20	0,00	0,00	9,55	6,38
<b>Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia SKPD</b>	-	-	-	<b>5.725.000</b>	-	-	-	-	<b>4.725.000</b>	-	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
Pengadaan pakaian dinas harian (PDH)	-	-	-	5.725.000	-	-	-	-	4.725.000	-	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
<b>Program Pengawasan dan Pengendalian Program</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	-	-	<b>1.075.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.441.550</b>	-	-	100,00	100,00	96,10	0,00	0,00	19,77	17,82
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan	1.075.000	1.500.000	1.500.000	-	-	1.075.000	1.500.000	1.441.550	-	-	100,00	100,00	96,10	0,00	0,00	19,77	17,82

## RENSTRA KECAMATAN PANJATAN | 2017

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>63.851.625</b>	<b>125.132.000</b>	<b>138.035.100</b>	<b>178.500.000</b>	<b>208.810.000</b>	<b>63.081.625</b>	<b>125.071.400</b>	<b>136.330.100</b>	<b>176.682.600</b>	<b>208.032.750</b>	98,79	99,95	98,76	98,98	99,63	38,15	38,65
Penyusunan Profil Kecamatan	1.370.000	-	-	-	-	1.370.000	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	4.036.000	-	-	-	-	4.036.000	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan rencana pembangunan daerah	15.440.000	-	-	-	-	15.170.000	-	-	-	-	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evaluasi Pembangunan Desa (Lomba Desa) Tk. Kecamatan	1.879.125	-	-	-	-	1.879.125	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi kemitraan dan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah pedesaan	2.000.000	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi pelaksanaan keamanan lingkungan (patroli terpadu)	6.551.500	-	-	-	-	6.551.500	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi pelaksanaan pengisian dan pemilihan kepala desa dan perangkat desa	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi penyusunan produk hukum tingkat desa	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	3.500.000	-	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RENSTRA KECAMATAN PANJATAN 2017

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
wawasan kebangsaan																	
Fasilitasi kegiatan kesenian dan budaya daerah	4.350.000	-	-	-	-	4.350.000	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyuluhan Pengarusutamaan Gender	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi pembinaan, dan pengembangan pemuda dan olah raga serta organisasi pemuda	4.750.000	-	-	-	-	4.750.000	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi, monitoring penggunaan dana bantuan desa (DAD dan ADD)	2.475.000	-	-	-	-	2.475.000	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi, monitoring, penanganan dan pembinaan PMKS dan PSKS serta pembinaan penanganan permasalahan sosial	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyusunan Database Kecamatan	-	2.491.000	4.211.000	4.000.000	6.000.000	-	2.491.000	4.077.150	3.941.000	5.958.600	0,00	100,00	96,82	98,53	99,31	38,01	37,18
Pembinaan Sosial dan Masyarakat	-	24.982.000	26.982.000	32.000.000	36.380.000	-	24.982.000	26.701.600	31.763.800	36.351.900	0,00	100,00	98,96	99,26	99,92	13,43	13,43
Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikan	-	4.623.000	4.939.500	15.000.000	17.500.000	-	4.623.000	4.873.050	14.947.700	17.463.500	0,00	100,00	98,65	99,65	99,79	75,73	76,33
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	-	11.141.000	23.641.100	23.000.000	25.000.000	-	11.141.000	23.537.350	22.952.600	24.997.400	0,00	100,00	99,56	99,79	99,99	39,39	39,23
Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan	-	15.750.000	16.500.000	16.500.000	18.250.000	-	15.737.500	16.250.800	16.367.600	18.186.900	0,00	99,92	98,49	99,20	99,65	5,12	5,03
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	-	17.120.000	14.750.000	32.000.000	43.050.000	-	17.082.000	14.522.350	31.646.600	43.046.800	0,00	99,78	98,46	98,90	99,99	45,88	46,32
Pembinaan budaya daerah, pemuda dan	-	13.721.000	12.939.500	16.000.000	17.200.000	-	13.720.900	12.763.050	15.958.500	17.170.300	0,00	100,00	98,64	99,74	99,83	8,49	8,55

## RENSTRA KECAMATAN PANJATAN | 2017

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
olah raga																	
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan	-	8.904.000	8.904.000	10.000.000	12.250.000	-	8.904.000	8.850.550	9.992.000	12.243.150	0,00	100,00	99,40	99,92	99,94	11,60	11,61
Pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif	-	3.582.000	2.474.000	5.000.000	7.180.000	-	3.572.000	2.474.000	5.000.000	7.180.000	0,00	99,72	100,00	100,00	100,00	38,26	38,32
Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan	-	22.818.000	22.694.000	25.000.000	26.000.000	-	22.818.000	22.280.200	24.112.800	25.434.200	0,00	100,00	98,18	96,45	97,82	4,54	3,78

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dengan memperhatikan permasalahan, sumber daya dan juga uraian tugas dari kecamatan maka dapat ditentukan peluang dan keadaan yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan. Kecamatan Panjatan dengan berbagai masalah, keadaan, potensi yang dimiliki dan peluang dapat direncanakan suatu pelayanan yang semakin meningkat dari periode 5 tahun sebelumnya.

Tantangan untuk pengembangan pelayanan Kecamatan Panjatan yang diinginkan di masa depan adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat benar-benar dapat dioperasionalkan secara nyata dan dilaksanakan secara rasional dengan dukungan anggaran yang memadai
2. Seluruh data di semua tingkatan harus tepat dan akurat serta selalu di update karena akan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan.
3. Sistem manajemen grup/kelompok kesenian tertangani secara profesional. Sehingga mereka dapat tampil secara baik dan menghibur. Sehingga dengan manajemen yang profesional hasil dari kegiatan ini dapat menjadi sumber income yang cukup untuk menghidupi keluarga pelaku seni tersebut.
4. Kualitas layanan beberapa prasarana dasar yang dirasakan oleh masyarakat masih sangat memadai, khususnya untuk air bersih perpipaan dan sanitasi. Sehingga pada saat musim kemarau tiba, warga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
5. Penurunan jumlah penduduk miskin yang ada di Kecamatan Panjatan dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
6. Kecamatan ikut serta memfasilitasi kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan masyarakat seperti: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Panjatan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan partisipatif (musrenbang) untuk mengajak masyarakat mengemukakan apa yang mereka butuhkan.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan optimal. Penyusunan berbagai produk pemerintahan desa yang berupa laporan pertanggungjawaban kepala desa dan peraturan desa dapat selesai tepat waktu sehingga jalannya pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat dapat optimal.

3. Kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku semakin tinggi. Misalnya saja untuk Kartu Tanpa Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijin Mendirikan bangunan (IMB) dan lain-lain dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pengembangan Usaha mikro kecil dan menengah dapat berjalan secara optimal sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat.
5. Kegiatan organisasi kepemudaan dan olah raga sudah terbentuk di masing-masing dusun dan beroperasi dengan baik. Di dusun dan di tingkat desa aktivitas kepemudaan dan keolahragaan berjalan sangat dinamis.

## BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan mendasar tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Panjatan adalah sebagai berikut berikut :

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan**  
**Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Panjatan**

Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar kewenangan SKPD)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambaran Pelayanan Kecamatan</li> <li>• Gambaran Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelayanan sosial kemasyarakatan berjalan dengan lancar</li> <li>▪ Pembinaan pelayanan umum berjalan dengan lancar</li> <li>▪ Pembinaan penyelenggaraan berjalan dengan lancar pemerintahan desa berjalan dengan lancar</li> <li>▪ Terjaganya keamanan dan ketertiban lingkungan</li> <li>▪ Penyusunan data base kecamatan sudah berjalan</li> <li>▪ Peningkatan kualitas pendidikan telah berjalan</li> <li>▪ Pendampingan budaya daerah pemuda dan olah raga</li> <li>▪ Perencanaan pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah sudah berjalan</li> <li>▪ Pembinaan wawasan kebangsaan sudah berjalan</li> <li>▪ Pendampingan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif sudah berjalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja Pada Kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterbatasan anggaran</li> <li>▪ SDM karyawan kecamatan</li> <li>▪ Sarana dan prasarana</li> <li>▪ DPA OPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan (UU, PP, Perda, Perbup)</li> <li>▪ Kebijakan dari Kabupaten</li> <li>▪ APBD Kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sarana dan prasarana pelayanan belum sesuai standar dan kebutuhan pelayanan</li> <li>▪ Kualitas dan kuantitas SDM karyawan kecamatan</li> <li>▪ Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan dengan optimal</li> <li>▪ Fasilitasi kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan pemuda belum berjalan optimal</li> <li>▪ Perubahan peraturan perundangan yang begitu cepat.</li> <li>▪ Banyak kegiatan yang belum bisa tercover dalam DPA OPD</li> <li>▪ Proses Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari OPD tingkat Kabupaten tidak kurang terintegrasi dan koordinasi dengan pengampu kepentingan di tingkat Kecamatan dan Desa</li> <li>▪ Masih adanya peredaran baik miras maupun narkoba ditempat terselubung</li> <li>▪ Munculnya konflik yang disebabkan adanya penambangan pasir</li> <li>▪ Terdapat lokasi-lokasi rawan bencana, kejahatan, dan ketertiban</li> </ul>
Kajian terhadap RTRW	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan kajian tentang RTRW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU TR No.26 Tahun 2006</li> <li>• Perda Kulon Progo No.1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran</li> <li>• Personil</li> <li>• Sarana prasaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Bupati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemampuan pesonil kecamatan terbatas</li> <li>▪ Anggaran tidak ada</li> </ul>

		Tahun 2012	a		
--	--	------------	---	--	--

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi: **“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”**

Untuk mewujudkan Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa seperti tersebut dalam visi Kulon Progo, maka pembangunan dapat dirumuskan menjadi 4 misi, yaitu :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berbudaya
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas

Dari Visi Pembangunan tersebut diatas, khusus yang terkait dengan tugas dan fungsi dari kecamatan adalah pada misi ke 3 (tiga) yaitu ” Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram”.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Lendah terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram  • Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sarana dan prasarana pelayanan belum sesuai standar dan kebutuhan pelayanan</li> <li>▪ Kualitas dan kuantitas SDM karyawan kecamatan</li> <li>▪ Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan dengan optimal</li> <li>▪ Fasilitasi kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sarana dan prasarana belum memadai</li> <li>➢ Keterbatasan kuantitas SDM</li> <li>➢ Anggaran belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Semangat PNS Kecamatan tinggi</li> <li>➢ TPP meningkat</li> <li>➢ Komitmen Bupati untuk mensejahterakan masyarakat</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</li> </ul>	<p>pemuda belum berjalan optimal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perubahan peraturan perundangan yang begitu cepat.</li> <li>▪ Banyak kegiatan yang belum bisa tercover dalam DPA OPD</li> <li>▪ Proses Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari OPD tingkat Kabupaten tidak kurang terintegrasi dan koordinasi dengan pengampu kepentingan di tingkat Kecamatan dan Desa</li> <li>▪ Masih adanya peredaran baik miras maupun narkoba ditempat terselubung</li> <li>▪ Terdapat lokasi-lokasi rawan bencana, kejahatan, dan ketertiban</li> </ul>		
--	--	--	--	--

### 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kecamatan Panjatan dalam memberikan pelayanan serta memberikan rekomendasi untuk izin usaha tambak udang di wilayah pantai selatan harus memperhatikan faktor lingkungan dan dampaknya. Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa usaha eksplorasi dan eksploitasi harus memperhatikan faktor pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup. Hal ini perlu diperhatikan karena setiap usaha penambangan berpotensi akan menimbulkan dampak lingkungan. ke masyarakat. Seringkali adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) akan menimbulkan gesekan dan konflik di masyarakat.

Faktor pendorong dalam memberikan pelayanan dalam pemanfaatan Tata ruang dan Lingkungan antara lain: .

1. Telah memiliki Perda RTRW
2. Keterbukaan masyarakat dan budaya gotong royong.
3. Masyarakat masih relative mudah untuk diingatkan jika terjadi pelanggaran

Sedangkan faktor penghambat pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS antara lain :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan perundang-undangan
2. Keterbatasan SDM

Tabel 3.3

**Permasalahan Pelayanan Kecamatan Panjatan Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mensosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang tersosialisasinya Perda RTRW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan SDM</li> <li>Kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan perundang-undangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah memiliki Perda RTRW</li> <li>Keterbukaan masyarakat dan budaya gotong royong</li> <li>Masyarakat masih relative mudah diingatkan jika terjadi pelanggaran</li> </ul>

### 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Panjatan adalah :

1. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi/pertanian, pariwisata, pengelolaan usaha ekonomi produktif dan dunia usaha.
2. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami penurunan.
3. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan dan desa.
4. Kerentanan wilayah terhadap bencana tanah longsor dan antisipasi bencana.
5. Rendahnya kualitas pelayanan infrastruktur .
6. Keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum masyarakat.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Kecamatan Panjatan periode tahun 2017 – 2022 adalah “Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel”. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TRANSISI 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,26	77,26	78,26	79,26	80,26	81,26
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	88,32	89,74	90,46	90,88	91,31	91,60

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan serta memperhitungkan faktor penentu keberhasilan, prioritas, tujuan, dan sasaran maka perlu ditetapkan strategi. Adapun pengertian strategi pembangunan daerah adalah :

- a. Kebijakan dalam mengimplementasikan program Camat, sebagai payung dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan
- b. Cara mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan yang dituangkan/ dirumuskan dalam bentuk kebijakan.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Panjatan tahun 2017-2022 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Visi	: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa		
Misi 3	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib, dan tenteram		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Mengoptimalkan sistem pelayanan umum	Peningkatan kualitas pelayanan umum
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Mengoptimalkan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

**BAB VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode renstra 2017-2022 di Kecamatan Panjatan adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
  - a. Penyediaan jasa/peralatan perkantoran
  - b. Penyediaan Jasa Keuangan
  - c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi, dan Koordinasi
- 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja**
  - a. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan
  - c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
- 3. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD**
  - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
  - b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- 4. Program Peningkatan Pelayanan Umum Kecamatan**
  - a. Pelayanan umum Kecamatan
  - b. Pelayanan sosial dan kemasyarakatan
- 5. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah**
  - a. Penyusunan Database Kecamatan
  - b. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan
  - c. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
  - d. Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan
  - e. Pendampingan budaya daerah, pemuda dan olahraga
  - f. Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah
  - g. Peningkatan Wawasan Kebangsaan
  - h. Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Panjatan yang akan dilaksanakan tahun 2017-2022 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif**  
**Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo**

TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahuh Awal Tahun 2016	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
					Tahun Transisi 2017		Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2022			
					target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)		
Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Meningkatnya pelayanan kecamatan	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	20	91,32	20	90,49	20	70,72	20	68,14	20	73,68	20	88,77	20	483,12		
		Penyediaan jasa dan Peralatan Perkantoran	Tersedianya jasa perkantoran	60	12	46,69	12	46,69	12	46,69	12	46,69	12	46,69	12	46,69	60	280,14		
		Penyediaan Jasa Keuangan	Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan dan barang	60	12	18,80	12	18,80	12	18,80	12	18,80	12	18,80	12	18,80	60	112,80		
		Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Tersedianya makan dan minum rapat dan tersedianya biaya konsultasi dan koordinasi	60	12	25,83	12	25,00	12	5,23	12	2,65	12	8,19	12	23,28	60	90,18		
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana perkantoran</b>	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	100	20	407,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	407,17
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	94	28	125,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	94	125,05
		Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpenuhinya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	60	12	282,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	282,12

**RENSTRA KECAMATAN PANJATAN 2017**

TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun Awal Tahun 2016	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
					Tahun Transisi		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2022	
					2017		2018		2019		2020		2021		2022		2022	
					target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)
		<b>Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD</b>	Cakupan ketersediaan sarana/prasarana kerja dan kualitas SDM OPD	0	0	-	20	222,59	20	168,83	20	162,67	20	175,90	20	211,92	20	941,91
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran				9	140,59	10	83,83	9	77,67	12	90,90	15	126,92	55	519,91
		Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpenuhinya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran				12	82,00	12	85,00	12	85,00	12	85,00	12	85,00	60	422,00
		<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja</b>	Cakupan perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja	100	20	34,00	20	15,50	20	11,70	20	11,28	20	12,19	20	14,69	100	99,36
		Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	Tersusunnya rencana kerja SKPD	2	3	25,00	2	7,00	3	6,00	2	6,00	2	6,00	2	7,00	14	57,00
		Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester	2	2	4,00	2	4,00	2	2,70	2	2,53	2	2,69	2	3,69	12	19,61
		Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja	19	19	5,00	19	4,50	19	3,00	19	2,75	19	3,50	19	4,00	114	22,75
		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	Cakupan peningkatan pelayanan Kecamatan	37,14	42,14	54,43	61,43	54,43	76,07	41,10	85,71	39,60	92,86	42,82	100	51,58	100	283,96
		Pelayanan Sosial dan Masyarakat	Terkoordinasikannya penanganan permasalahan sosial	60	12	31,43	12	29,43	12	21,10	12	20,00	12	22,00	12	26,58	60	150,54



RENSTRA KECAMATAN PANJATAN | 2017

TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun Awal Tahun 2016	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
					Tahun Transisi		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2022	
					2017		2018		2019		2020		2021		2022		2022	
					target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)
			Terkoordinasikannya kader penanggulangan kemiskinan	60	12		12		12		12		12		12		60	
			Terkoordinasikannya HKG PKK	5	1		1		1		1		1		1		5	
			Terkoordinasikannya Kecamatan Sehat	20	4		4		4		4		4		4		20	
			Terbinanya KAKB	20	4		4		4		4		4		4		20	
			Terlaksananya Safari Jumat, Safari Tarawih dan Pengajian PNS	28	28		10		10		12		12		12		56	
			Tersosialisasikannya KDRT dan Pengarusutamaan Gender	5	1		1		1		1		1		1		5	
			Termonitornya PMKS dan PSKS	0	0		2		2		2		2		2		2	
			Terdampinginya pengembangan pemberdayaan perempuan dan PKK	0	0		1		1		1		1		1		5	
		Pelayanan Umum Kecamatan	Terkelolanya PATEN	60	12	23,00	12	25,00	12	20,00	12	19,60	12	20,82	12	25,00	60	133,42
			Tersosialisasikannya PATEN	50 org	2		2		2		2		2		2		10	
			Tercetaknya dokumen perijinan	0	0		50		55		60		60		60		285	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	Cakupan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	87,75	88,32	165,61	89,74	178,60	90,46	134,86	90,88	129,94	91,31	140,51	91,6	169,26	91,6	918,78
		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan	Terevaluasinya produk hukum tingkat Desa		33	36,29	33	39,00	33	29,00	33	25,00	33	32,51	33	39,96	165	201,76
			Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa 11 Desa		4		4		4		4		4		4		20	

## RENSTRA KECAMATAN PANJATAN 2017

TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahuh Awal Tahun 2016	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
					Tahun Transisi		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2022	
					2017		2018		2019		2020		2021		2022		2022	
					target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)
			Terdampinginya tertib administrasi keuangan Desa 11 Desa		4		4		4		4		4		4		20	
			Terdampinginya penyaluran dana (ADD, DD, DBH) pemerintah Desa 11 Desa		12		12		12		12		12		12		60	
			Terkoordinasinya Intensifikasi PBB 11 Desa		10		10		10		10		10		10		50	
			Terkoordinasikanya Pemilihan Kades dan Perangkat Desa lainnya		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa	
			Terfasilitasinya penyusunan APBDes				11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa		11 desa	
			Terfasilitasinya JDIH Desa				2		2		2		2		2		10	
		Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Terlaksananya Patroli terpadu	60	12	43,85	12	46,70	12	25,00	12	25,00	12	25,00	12	35,00	60	200,55
			Terfasilitasinya Posko penanggulangan bencana alam tingkat Kecamatan	60	12		12		12		12		12		12		60	
			Terfasilitasinya pencegahan Penyakit Masyarakat	5	1		1		1		1		1		1		5	
			Terfasilitasinya koordinasi pelaksanaan Pemilu						4									
			Terfasilitasinya manajemen konflik				4		4		4		4		4		16	
			Terbinanya Linmas						1		1		1		1		3	

RENSTRA KECAMATAN PANJATAN | 2017

TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun Awal Tahun 2016	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
					Tahun Transisi		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2022	
					2017		2018		2019		2020		2021		2022		2022	
					target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)
		Penyusunan database Kecamatan	Tersusunnya Profil Kecamatan	5	1	5,00	1	6,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	6,00	5	32,00
		Pendampingan peningkatan kualitas pendidikan	Terbinanya Pengajar PAUD	20 org	20	9,88	1	11,50	1	8,00	1	8,00	1	8,00	1	11,50	5	56,88
			Terbinanya Pengelola PAUD						2		2		2		2		6	
			Terbinanya UKS Tingkat Kecamatan	40 org	40		1		1		1		1		1		5	
			Terbinanya PKBM	15 org	15		1		1		1		1		1		5	
			Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS	1	1		1		1		1		1		1		5	
			Terfasilitasinya PMTAS	40 org	40													
			Termonitornya perkembangan perpustakaan masyarakat				1		1		1		1		1		4	
			Termonitornya Jam Belajar Masyarakat						1		1		1		1		3	
		Pendampingan Budaya daerah, Pemuda dan Olah Raga	Terfasilitasinya kegiatan olah raga masyarakat	4	12	11,78	12	12,00	24	9,86	24	9,86	24	12,00	24	12,00	108	67,50
			Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional	5	1		1		1		1		1		1		5	
			Terkirimnya Festival Seni dan Budaya	5	1		1		1		1		1		1		5	
			Terkirimnya peserta Nyadran Agung	5	1		1		1		1		1		1		5	
			Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan	5	1		1		1		1		1		1		5	
			Terdampinginya pengembangan wisata										1		1		2	

## RENSTRA KECAMATAN PANJATAN | 2017

TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahuh Awal Tahun 2016	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2022	
					Tahun Transisi 2017		Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022			
					target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)	target	Rp. (Jutaan)
		Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Tersusunya RPTK	5	1	35,00	1	38,60	1	35,00	1	34,08	1	35,00	1	40,00	5	217,68
			Terkoordinasinya Lomba Desa	5	1		1		1		1		1		1		5	
			Terkoordinasinya BBGRM	5	1		1		1		1		1		1		5	
			Tersusunnya Laporan evaluasi pembangunan daerah	20	4		4		4		4		4		4		20	
		Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya peringatan Hari Besar nasional	2	2	18,80	2	18,80	2	18,00	2	18,00	2	18,00	2	18,80	10	110,40
			Tersosialisasinya Wawasan Kebangsaan	1	1		1		1		1		1		1		5	
			Terfasilitasinya pelatihan Paskibra	1	1		1		1		1		1		1		1	
		Pendampingan Lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif	Terbinanya lembaga ekonomi produktif masyarakat	2 lembaga	2 lembaga	5,00	2 lembaga	6,00	4 lembaga	5,00	4 lembaga	5,00	4 lembaga	5,00	4 lembaga	6,00	18	32,00
			Terbinanya UKM	20	20		25		30		35		40		45		180	
			Terbinanya BUMDes						11		11		11		11		11	

## BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dari apa yang akan dicapai lima tahun mendatang yang dituangkan didalam RENSTRA Kecamatan Panjatan untuk dari tahun 2017-2022 yaitu sebagai berikut :

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu  
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017– 2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TRANSISI 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)					KONDISI AKHIR RENSTRA
					2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,26	77,26	78,26	79,26	80,26	81,26	81,26
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	88,32	89,74	90,46	90,88	91,31	91,60	91,60

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah serta mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka Kecamatan Panjatan tertuang pula program yang harus dicapai dalam pelaksanaan kinerja tahun 2017-2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 7.2

**Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Yang Mengacu  
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017– 2022**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TRANSISI 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)					KONDISI AKHIR RENSTRA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	42,14	61,43	76,07	85,71	92,86	100	100
2	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	88,32	89,74	90,46	90,88	91,31	91,60	91,60

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Panjatan tahun 2017 – 2022 merupakan dokumen yang memaparkan tujuan, sasaran dan strategi serta Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Panjatan disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati. Rancangan Rencana strategis disusun dengan mendasarkan pada :

1. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi serta Tata kerja pada Kecamatan.
2. Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022.
3. Pokok-pokok pikiran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kemudian dibahas oleh Tim Penyusun dengan melakukan analisa kekuatan, hambatan, peluang dan tantangan yang ada.

Rencana Strategis Kecamatan Panjatan juga akan memudahkan jajaran aparatur dan masyarakat Kecamatan Panjatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun, sehingga dengan demikian akan terwujud akuntabilitas Satuan Kerja Perangkat daerah Kecamatan Panjatan. Apabila dapat terwujud akuntabilitas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diharapkan pemerintahan yang baik akan terwujud di Kecamatan Panjatan khususnya pada umumnya pada masyarakat Kecamatan Panjatan.

Pembahasan penyusunan Renstra ini sudah dilakukan secara bertingkat dari Tim Penyusun kemudian dilakukan sosialisasi dan pembahasan seluruh aparatur dan juga menerima masukan masyarakat melalui Kepala Desa dan perangkatnya. Namun demikian tidak berarti bahwa Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Panjatan sudah sempurna, tetapi masih perlu saran, kritik dan masukan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Untuk itu besar harapan kami kepada semua pihak untuk dapat peduli agar rancangan Rencana Strategis Kecamatan Panjatan menjadi baik dan benar dan atas seluruh bantuan semua pihak kami mengucapkan terimakasih.

Panjatan, 20 Desember 2017

CAMAT PANJATAN,

SUDARMANTO, S.IP, M.Si.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19730512 199803 1 008